

PENDIDIKAN, HOMINISASI DAN HUMANISASI

oleh:

Achmad Dardiri
(Dosen FIP-UNY)

Abstract

Theoretically and ideally, education is an attempt to humanize human beings. This implies that teachers, lectures, tutors or instructors have to realize it when they are dealing with children or learners. However, in practice, the opposite sometimes, or even often, takes place. The dehumanization of children or learners occurs through ways of teaching that are authoritarian, distressing, frightening and through other ways not conducive to attempts to develop humanistic potentials. In the context of education, an attempt to humanize human beings can be called the humanization of children or learners. The meaning of humanism in this context can be seen, explicitly or implicitly, as the views from some figures that this article talks about.

Key words: education, humanization.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses pe-manusia-an manusia, demikian pandangan Driyarkara. Sehubungan dengan masalah ini, dia memperkenalkan dua istilah yang saling terkait yakni *hominisasi* dan *humanisasi*. Yang dimaksud *hominisasi* dan *humanisasi* adalah "pemanusiaan manusia muda' yang dipimpin dengan cara sedemikian rupa sehingga dia bisa berdiri, bergerak, bersikap, bertindak sebagai manusia. Dan ini hanya terbatas pada apa yang minimal. Belum cukuplah, jika manusia hanya tidak merangkak dengan 'kaki empat' dan 'menggonggong'. Manusia tidak hanya harus menjadi *homo* (manusia); dia juga harus menjadi *homo yang human*, artinya berkebudayaan lebih tinggi. Dan ini juga memuat perhalusan" (Driyarkara, 1980: 85-86).

Jika *hominisasi* dimaksudkan suatu upaya menjadikan manusia menjadi manusia pada taraf minimal, maka *humanisasi* adalah suatu upaya menjadikan manusia supaya lebih manusiawi atau lebih sempurna, yang dalam istilah Driyarkara *homo yang human*.

Dua istilah tersebut sangat terkait dengan istilah lainnya, yakni *humanismus* atau *humanisme*. Humanisme berarti "perkembangan kebudayaan yang lebih tinggi." Humanismus atau humanisme dalam arti luas dapat berarti pula "kehidupan manusia dan masyarakat yang sempurna, karena cocok dengan tuntutan-tuntutan dan cita-cita manusia."

Yang jelas, *humanismus* atau *humanisme* berarti perkembangan yang lebih tinggi, di atas tingkat yang niscaya, di atas tingkat minimal" (Driyarkara, 1980: 86).

Makna humanisme ternyata terus mengalami perkembangan seiring dengan perdebatan yang terus terjadi terhadap konsep humanisme. Makna humanisme "selalu menggelincir" dari pengertiannya yang tetap (Sastrapratedja, 2003: 23). Pembicaraan kita tentang humanisme pun tampaknya akan selalu relevan "sejauh manusia masih mempertanyakan apa artinya menjadi manusia agar layak disebut manusia" (Sastrapratedja, 2003: 24). Hanya saja bentuk dan pengeksresiannya berbeda-beda sebagaimana tampak dari pandangan para filsuf berikut.

B. Pembahasan

1. Humanisme dalam konteks Pendidikan

Makna humanisme sebenarnya selalu mengiringi upaya manusia yang disebut pendidikan, karena dengan dan dalam pendidikan itu peserta didik sedang diupayakan pengembangan potensi kemanusiaannya ke tingkat yang relatif lebih berbudaya, lebih baik, dan lebih sempurna. Dengan demikian, makna humanisme dalam kegiatan pendidikan dapat dilihat baik secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, tampak antara lain dari pandangan Driyarkara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah "proses pemanusiaan manusia muda". Secara implisit, makna humanisme dalam pendidikan dapat kita lihat pula antara lain dari pandangan keempat tokoh berikut ini, yakni: John Dewey, Erich Fromm, Paulo Freire, dan Richard Rorty. Sudah barang tentu keempat tokoh yang akan dibahas ini sekedar contoh saja untuk melihat makna humanisme itu dalam proses pendidikan.

2. Pandangan John Dewey

John Dewey adalah salah seorang filsuf yang menerapkan dan mengembangkan filsafat pragmatisme ke dalam pendidikan dalam upaya mengadakan perubahan dan pembaharuan, utamanya dalam pendidikan persekolahan. Baginya, pendidikan merupakan sebuah aktivitas sosial, dan sekolah merupakan agen sosial yang membantu membentuk karakter dan perilaku manusia (Ornstein & Levine, 1985: 133). Pendidikan dipahami sebagai proses sosial, dan anggota kelompok yang belum dewasa, khususnya anak-anak diarahkan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Sekolah dalam konsepsi Dewey bercorak sosial, ilmiah,

dan demokratis. Sekolah memperkenalkan peserta didik kepada masyarakat. Sekolah sebagai masyarakat dalam bentuk miniatur merupakan sarana untuk membawa peserta didik ikut terlibat dalam partisipasi sosial (Ornstein & Levine, 1985: 132-133).

Dewey sangat yakin bahwa pendidikan bersifat pragmatis dan dikaitkan dengan kehidupan pelajar atau peserta didik. Menurutnya, "pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, dan bukan persiapan untuk hidup". Pelajar atau peserta didik dalam kaitan ini menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan. Pengalaman individual peserta didik menjadi titik tolak dalam sekolah. Dewey dikenal sebagai penentang gagasan sekolah yang otoriter (Ellis et. al., 1991: 109). Dia juga tidak setuju pada pendidikan tradisional yang lebih menekankan pada pentingnya kurikulum, dan mengabaikan potensi peserta didik (Brickman and Lehrer, 1959: 85).

Jadi, dapat dimengerti jika dia mengembangkan pendidikan progresif. Menurut Dewey (Naomi, 2001: 243), alasan mengapa dia mengembangkan pendidikan progresif adalah pertama, karena pendidikan progresif dirasa lebih sesuai dengan cita-cita demokratis jika dibandingkan dengan prosedur-prosedur sekolah tradisional yang terlalu otoriter. Kedua, pendidikan progresif menggunakan metode-metode yang manusiawi jika dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sekolah tradisional yang sering diwarnai dengan penekanan dan pemaksaan.

Dari pandangan Dewey, kita dapat menangkap makna humanisme dalam proses pendidikan. Peserta didik menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan. Kebijakan dan perlakuan yang cenderung otoriter dalam arti menekan dan memaksa peserta didik dia hindari bahkan dia tentang. Baginya, dalam proses pendidikan, peserta didik harus dimanusiawikan, harus dibudayakan, dan inilah yang dimaksud humanisasi peserta didik.

Pandangan Dewey sebagaimana kita lihat di atas memang merupakan reaksi terhadap praktek pendidikan tradisional yang dianggap otoriter dan terlalu berpusat pada guru/pendidik dan berpusat pada *subject matter*, sehingga posisi peserta didik hanya dijadikan obyek pendidikan. Penerapan beberapa metode pendidikan di Indonesia seperti metode proyek, pemberian tugas individual, CBSA dsb. Nampaknya dimaksudkan untuk lebih memberdayakan peserta didik. Ketika peserta didik diberi tugas individual, diharapkan potensi dirinya akan muncul dan berkembang seperti: pemikiran, kreativitas, inisiatifnya dsb. CBSA diterapkan di Indonesia sudah tentu maksud awalnya adalah ingin agar peserta

didik yang aktif, tidak seperti metode konvensional yang lebih aktif adalah guru/dosennya, sehingga peserta didiknya pasif mendengarkan dan mencatat saja apa yang diberikan oleh guru/dosennya. Namun, dalam prakteknya banyak penyimpangan. Yang terjadi di lapangan, gurunya hanya meninggalkan catatan atau tugas kepada peserta didiknya, sementara guru/dosennya tidak menunggunya dan tidak berperan sebagai fasilitator.

Sebetulnya, jika metode-metode yang diterapkan dengan maksud mengaktifkan dan memberdayakan peserta didik dapat dilaksanakan dengan benar dan baik di lapangan, sudah tentu hasilnya akan tampak, dan akan sesuai dengan fungsi pendidikan itu sendiri yakni mengembangkan kemampuan atau mengaktualisasikan semua potensi kemanusiaan peserta didiknya. Inilah sebetulnya yang dimaksud dengan humanisasi manusia.

3. Pandangan Erich Fromm

Menurut Fromm (Naomi, 2001: 344), dalam kebudayaan kita ini, pendidikan terlalu sering menghasilkan pembinasan kespontanan dan mengganti cetusan-cetusan jiwa yang asli dengan perasaan, pikiran dan harapan yang sengaja disuntikkan dari luar. Perasaan-perasaan yang tercetus secara spontan ditekan, dan dengan begitu perkembangan individualitas sejati sejak sangat dini sudah dikerdilkan pula, bahkan dalam kenyataan, penekanan (upaya menekan perasaan spontan) ini dilakukan sejak anak-anak menerima pendidikan pertamanya.

Salah satu contoh perasaan yang paling dini ditekan menurut Fromm adalah yang berhubungan dengan penentangan langsung dan rasa tak senang. Pada awalnya, tiap anak pasti menyimpan sikap menentang dan daya berontak tertentu, lantaran selalu berada dalam konflik dengan lingkungan sekitar yang cenderung menghalangi gerak jelajahnya, dan sikap itu makin kental, karena sebagai pihak yang lebih lemah, si anak biasanya harus mengalah. Proses pendidikannya pun direkayasa sedemikian rupa dengan salah satu sasaran awal berupa penghapusan tanggapan antagonistik anak ini. Metodenya pun bermacam-macam: ada yang mengancam dan menghukum; menakut-nakuti anak sampai pada cara-cara yang lebih samar, yakni lewat penyipuan atau "penjelasan" yang membingungkan si anak dan membuatnya menanggalkan sikap menentang semula. Dalam kealahannya itu, pertama-tama anak akan berhenti mengungkapkan perasaan-perasaan sejatinya, kemudian lama kelamaan ia berhenti merasa.

Pembelokan serupa juga terjadi terhadap pemikiran orisinal. Sejak langkah

pertama dalam pendidikan, pemikiran orisinal ditekan dan sebagai gantinya benak anak-anak dijejali dengan gagasan-gagasan yang siap pakai. Menurut Fromm, beberapa metode pendidikan yang digunakan dewasa ini untuk menekan pemikiran orisinal anak antara lain: pertama, penonjolan pengetahuan tentang fakta, atau lebih tepatnya pengetahuan tentang informasi. Banyak orang yang mengira bahwa dengan mengetahui lebih banyak fakta, orang akan sampai pada pengetahuan tentang kenyataan. Ratusan fakta yang tercerai berai dan tidak ada hubungan satu sama lain ditimbunkan atau dijejalkan di kepala para peserta didik; waktu dan energi mereka habis untuk mempelajari lebih banyak fakta, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk berpikir. Memang berpikir tanpa mengetahui tentang fakta akan kosong dan fiktif. Namun, jika hanya 'informasi' yang 'ditelan', ini akan menghalangi tindakan berpikir (Naomi, 201: 347).

Metode pendidikan yang lain untuk merintangai pemikiran orisinal adalah dengan cara mengaburkan isu-isu. Hal ini antara lain ditandai dengan pernyataan bahwa persoalan-persoalan kehidupan terlalu rumit untuk dapat dipahami rata-rata orang. Padahal kenyataannya banyak persoalan yang mendasar tentang kehidupan perorangan dan kelompok yang begitu sangat sederhana, dan karena sederhananya sudah semestinya setiap orang dapat memahaminya. Namun, kebudayaan kita membuat isu-isu itu tampak seolah-olah sangat kompleks, sehingga hanya segelintir orang saja yang mampu memahaminya, termasuk dalam lapangan kerja yang sangat terbatas pun hanya segelintir orang yang namanya 'pakar' yang mampu mengerti. Hal ini menurut Fromm, sering dilakukan dengan sengaja untuk melemahkan semangat orang awam, sehingga mereka tidak percaya lagi pada kemampuan mereka sendiri untuk memikirkan masalah-masalah yang benar-benar bermakna. Individu merasa tidak berdaya dikeping timbunan data, dan dengan kesabaran yang memilukan hati, dia menunggu sampai segelintir orang yang namanya 'pakar' itu telah menemukan apa yang harus dikejakan (Naomi, 2001: 349).

Dari pandangan Fromm di atas, jelas bahwa humanisasi peserta didik itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara, antara lain dengan tetap menghargai perasaan-perasaan spontan dari peserta didik. Juga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pemikiran orisinalnya. Jangan sampai perasaan peserta didik itu ditekan dan dikerdilkan, karena hal itu termasuk bagian dari pengembangan individualitas sejati peserta didik. Jika apa yang dikatakan oleh Fromm benar, bahwa penekanan dan

pengerdilan terhadap cetusan perasaan spontan peserta didik itu dilakukan sejak anak-anak atau peserta didik menerima pendidikan pertamanya, tentu hal itu sangat ironis, karena hal itu justru dilakukan oleh para pendidik atau lembaga pendidikan.

Tampaknya Fromm sangat menghargai individualitas peserta didik, termasuk peserta didik yang suka menentang dan memiliki perasaan tidak senang. Cara-cara yang ditempuh seperti mengancam, menakut-nakuti dan menghukum anak atau peserta didik yang suka menentang dan memiliki perasaan tidak senang tentu tidak dapat dibenarkan. Termasuk dengan cara-cara yang lebih samar, yakni lewat penyuaipan atau 'penjelasan' yang membingungkan peserta didik, yang bertujuan agar peserta didik tersebut berhenti mengungkapkan perasaan-perasaan spontanasnya, karena hal itu dapat mematikan potensi peserta didik.

Pendidikan kita, menurut Fromm, juga ikut menekan dan mengerdilkan pemikiran orisinal peserta didik, dan menggantinya dengan penjejalan gagasan-gagasan yang siap pakai. Metode pendidikan dengan cara menyuapi peserta didik dengan fakta dan informasi yang sudah matang tanpa mengikutsertakan peserta didik untuk berpikir, jelas akan melumpuhkan pemikiran orisinal peserta didik, dan tentunya hal ini bertentangan dengan fungsi pendidikan itu sendiri, yakni mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik.

Fromm juga mensinyalir adanya metode pendidikan yang berupaya merintangikan pemikiran orisinal dengan cara mengaburkan isu-isu, seolah-olah semua persoalan kehidupan itu rumit dan hanya dapat ditangani oleh segelintir orang yang namanya 'pakar'. Cara-cara seperti ini dapat melemahkan semangat peserta didik, yang pada akhirnya mereka tidak percaya lagi pada kemampuan mereka sendiri. Padahal yang semestinya terjadi, peserta didik harus diyakinkan lewat proses pendidikan bahwa mereka mampu memecahkan beberapa persoalan mereka sendiri. Jadi, apa yang dinyatakan oleh Fromm di atas merupakan bukti bahwa pendidikan ternyata belum mampu memanusiakan manusia, belum mampu membudayakan manusia, dan yang terjadi justru sebaliknya yakni dehumanisasi manusia, dehumanisasi peserta didik.

4. Pandangan Paolo Freire

Titik tolak filsafat Freire adalah kehidupan nyata. Kehidupan nyata yang dimaksud Freire adalah terjadinya penderitaan yang dialami oleh sebagian besar umat manusia, yang

diakibatkan oleh perlakuan yang tidak adil oleh sekelompok kecil orang. Manusia benar-benar herada pada 'situasi penindasan'. Bagi Freire, penindasan apa pun alasan dan namanya tetap saja tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan (dehumanisasi). Dehumanisasi bersifat ganda, yakni terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas, dan juga terjadi atas diri kaum penindas. Keduanya tetap menyalahi kodrat manusia sejati. Kaum tertindas menjadi tidak manusiawi, karena hak-hak asasi mereka dirampas dan dinistakan. Mereka bahkan dibuat tidak berdaya dan dibenamkan dalam 'kebudayaan bisu'. Sedangkan kaum penindas menjadi tidak manusiawi, karena telah melakukan dan memaksakan penindasan bagi sesamanya. Atas dasar itulah, maka satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah dengan mengembalikan manusia pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, memanusiaikan kembali manusia (humanisasi) merupakan pilihan mutlak (Freire, 1999: vi-vii). Jalan yang harus ditempuh untuk mengembalikan manusia pada harkat dan martabatnya sebagai manusia sudah tentu melalui pendidikan.

Dalam kaitan tersebut, Freire memperkenalkan perlunya pendidikan bagi kaum tertindas. Pendidikan adalah jalan menuju pembebasan yang permanen. Dia membagi menjadi dua tahap: tahap pertama, adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, dan melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap kedua, dibangun di atas tahap pertama, dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan (Collins, 1999: 39). Yang pertama, kaum tertindas menyingkap selubung dunia penindasan serta lewat praksis mereka meningkatkan diri pada transformasi dunia penindasan itu. Yang kedua, ketika kenyataan penindasan sudah diubah, pendidikan ini tidak lagi menjadi milik khas kaum tertindas, melainkan menjadi pendidikan semua manusia dalam proses pembebasan yang permanen (Freire, 2001: 444-445).

Pendidikan kaum tertindas yang dimaksud Freire harus dilaksanakan bukan *untuk*, melainkan *dengan* kaum tertindas secara individual maupun berkelompok dalam perjuangan yang tiada henti untuk meraih kemanusiaan mereka. Pendidikan ini menjadikan penindasan beserta sebab-musababnya sebagai obyek renungan kaum tertindas, dan dari situ mereka melibatkan diri dalam perjuangan membebaskan diri sendiri. Dalam perjuangan ini, pendidikan kaum tertindas akan terus menerus diperbaharui (Freire, 2001: 445). Freire memandang pendidikan sebagai kewajiban humanis dan liberal. Maksudnya, dengan pendidikan, kita memberdayakan sekaligus membebaskan masyarakat dan dominasi

pendidik. Dia juga menolak pendidikan sebagai upaya penjinakan kesadaran manusia, mentransformasikannya ke dalam wadah kosong. Kesadaran manusia dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi dan inilah yang dia tolak (Freire, 1999: 191). Pandangan Freire tampaknya memberikan inspirasi bagi para aktivis kemanusiaan di beberapa Negara, termasuk Indonesia. Pandangannya tentang pendidikan dianggap cocok untuk menyadarkan dan membebaskan, bukan saja bagi kaum tertindas, melainkan juga dalam proses pembebasan yang permanen bagi semua umat manusia.

Sebagaimana kita lihat akhir-akhir ini, bagaimana aktivis kemanusiaan 'menggarap' orang-orang yang lemah untuk diberdayakan agar keluar dari penindasan kaum penindas melalui pendidikan luar sekolah, penyuluhan-penyuluhan dan semacamnya dengan harapan kelak mereka mengetahui hak-haknya di samping kewajibannya. Hak-hak kaum tertindas sering diabaikan, seperti honorarium dsb. Melalui pendidikan dalam arti luas, semua orang diberdayakan, dimanusiawikan, diangkat derajatnya agar sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi, pendidikan bukan saja sebagai humanisasi kaum tertindas, melainkan juga bagi semua manusia.

5. Pandangan Richard Rorty

Dalam kaitannya dengan upaya pemanusiaan manusia, Rorty (salah seorang murid Dewey) sejalan dengan pandangan Gadamer, yang lebih memilih sudut pandang pendidikan dibanding sudut pandang epistemologis atau teknologis sebagai sasaran pemikiran. Dari sudut pandang pendidikan, pengungkapan sesuatu lebih penting dari pada menggemang kebenaran. Menurutnya, dari sudut pandang pendidikan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita mampu mengatakan dan membuat sesuatu yang baru dan lebih menarik mengenai diri kita, dalam makna metafisis adalah lebih penting bagi kita dibandingkan dengan aktivitas yang membentuk ulang diri kita dengan cara yang kurang spiritual (Rorty, 1980:359).

Dia lebih tertarik untuk menggunakan istilah *edifikasi* daripada istilah *education* atau *bildung*. Menurutnya, istilah *education* kedenagarannya terlalu datar,

dan istilah *bildung* terlalu asing. Oleh sebab itu, dia menggunakan istilah *edifikasi* untuk mempertahankan atau membiarkan proyek penemuan cara pengungkapan kata yang baru, lebih baik, lebih menarik dan lebih berhasil guna. Menurut Rorty, upaya yang harus dilakukan dalam mengedifikasi (mendidik) diri kita sendiri atau orang lain dapat berupa aktivitas hermeneutis dan aktivitas poitis. Aktivitas hermeneutis digunakan untuk menciptakan hubungan baik antara kebudayaan kita dengan kebudayaan asing (akulturasi). Sedangkan aktivitas poitis digunakan untuk mencari sasaran, kata-kata, atau disiplin ilmu baru yang diikuti dengan kebalikan hermeneutis, yakni upaya untuk menginterpretasi ulang lingkungan dekat kita dengan ketentuan invensi baru yang tidak kita kenal (Rorty, 1990:360).

Menurutnya, pendidikan harus dimulai dari akulturasi, dan yang diperlukan pertama kali untuk menjadi seorang *gebildet* (terpelajar) adalah pencarian akan objektivitas dan kesadaran akan adanya praktek social, di mana objektivitas tersebut tercakup. Kita harus melihat diri kita sendiri sebagai *ensoi* (objek), sebagaimana dideskripsikan oleh pernyataan-pernyataan yang objektif benar, disertai dengan pertimbangan dari rekan sejawat kita sebelum ada kemungkinan untuk melihat diri kita sendiri sebagai *pour soi* (subjek) (Rorty, 1980:365).

Selanjutnya, Rorty juga menyatakan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penekanannya pada persoalan pemfamiliarisasian kaum muda dengan apa yang oleh orang yang lebih tua menjadi familiar dipandang sebagai benar, apakah hal itu sungguh benar atau tidak. Dan fungsi pendidikan pada level ini bukan untuk menentang consensus yang berlaku mengenai apa yang benar. Sedangkan pada pendidikan tinggi non kejuruan lebih berfungsi membantu peserta didik menyadari bahwa mereka dapat menggarap ulang diri mereka sendiri, citra diri mereka, yang disisipkan kepada mereka oleh masa lalu mereka, yakni suatu citra diri yang menjadikan mereka warga Negara yang kompeten: menjadi suatu citra diri baru yang mereka sendiri ikut membantu menciptakannya (Rorty, 1999:118).

Pendidikan baginya adalah perkara *sosialisasi* dan *individuasi*. Sosialisasi harus mendahului individuasi dan pendidikan demi kebebasan tidak dimulai sebelum beberapa kendala disingkirkan terlebih dahulu. Perguruan tinggi non kejuruan lebih ditekankan pada persoalan untuk membangkitkan keraguan dan merangsang imaginasi, sehingga menantang konsensus yang berlaku. Menurutnya, jika pendidikan pra perguruan tinggi menghasilkan warga negara yang melek huruf, maka pendidikan pada perguruan tinggi menghasilkan

individu-individu pencipta-diri (Rorty, 1999: 119).

Rorty tampaknya lebih melihat arti pentingnya kreativitas peserta didik dalam bentuk pengungkapan sesuatu yang baru, lebih menarik, dan lebih berhasil guna dibandingkan dengan upaya menggenggam kebenaran. Membiarkan peserta didik mengungkapkan sesuatu yang baru, yang lebih menarik, dan lebih berhasil guna dari sudut pandang pendidikan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan pencarian dan penggenggam kebenaran. Yang manusiawi dalam pandangan Rorty adalah pendidikan yang bertujuan untuk sosialisasi diri peserta didik sekaligus individuasi peserta didik. Pada tahap sosialisasi, peserta didik menyesuaikan diri dengan anggapan yang ada dalam masyarakatnya, dan baru pada tahap individuasi, peserta didik dibiarkan untuk mengkritisi masyarakatnya bahkan bila perlu menentangnya.

Pandangan Rorty tentang pendidikan sebenarnya juga merupakan kritik terhadap kondisi masyarakat yang berpegang pada budaya 'manutan'. Dalam masyarakat yang menganut budaya ini, anak atau peserta didik yang baik adalah peserta didik yang selalu menyesuaikan diri secara terus menerus dengan orang tua, guru atau pendidik. Jika masyarakat seperti ini dibiarkan tanpa upaya pemberdayaan anak atau peserta didik yakni membangkitkan kreativitasnya, membangkitkan inisiatifnya, maka masyarakat seperti ini secara tidak disadari telah melakukan sesuatu kesalahan yang fatal yakni upaya penjinakan atau bahkan penjajahan terhadap hak anak atau peserta didik. Inilah yang disebut Rorty 'dehumanisasi peserta didik'. Humanisasi peserta didik dapat dilakukan oleh siapa saja: orang tua, guru atau pendidik atau bahkan masyarakat pada umumnya. Guru atau pendidik dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya yang berbeda dari orang tua atau gurunya, bahkan bila perlu mengkritisnya, yang penting kemasannya sopan. Pada tahap awal keberanian peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya perlu ditumbuhkan, dan baru patahap-tahap selanjutnya mereka diarahkan cara pengemasannya agar lebih sopan dsb.

C. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semangat dari keempat tokoh tersebut hampir sama, yakni pendidikan dipandang sebagai upaya humanisasi umat manusia, lebih khusus lagi humanisasi peserta didik. Keempat tokoh tersebut memiliki semangat yang sama

yakni berupaya menempatkan peserta didik pada posisi sebagai subyek pendidikan. Dalam hal ini, peserta didik tidak semata-mata menjadi sasaran pendidikan, tetapi sekaligus menempatkannya sebagai pelaku yang aktif dalam proses pembelajaran, atau dalam arti luas dalam proses pendidikan. Keempat tokoh sangat menentang cara-cara yang dapat mematikan inisiatif, kreativitas dan perkembangan peserta didik. Cara-cara seperti ini sangat merugikan peserta didik, karena dapat menghambat pengembangan potensi peserta didik. Upaya-upaya untuk menghambat, menekan, mengkerdilkan dan mematikan peserta didik dalam proses pendidikan tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan fungsi pendidikan itu sendiri yakni menumbuhkembangkan potensi kemanusiaannya ke taraf yang relatif lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih sempurna. Jangan sampai terjadi proses pendidikan yang dikhawatirkan oleh Martin Carnoy, sehingga dia memberi judul bukunya dengan *Education as Cultural Imperialism* (Carnoy, 1974). Pendidikan dalam hal ini bukan memberdayakan, dan mengaktualisasikan potensi positif peserta didik, tetapi karena sangat bernafsu, maka yang terjadi adalah penjajahan terhadap peserta didik. Hal ini berarti yang terjadi bukan haumanisasi peserta didik tetapi dehumanisasi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Brickman, William W. and Lehrer, Stanley (Eds.). 1959. *John Dewey: Master Educator*. New York: Society for the Advancement of Education, Inc.
- Carnoy, Martin. 1974. *Education as Cultural Imperialism*. New York: DAVID McKAY COMPANY, INC.
- Collins, Denis. 1999. *Paolo Freire: Kehidupan, Karya & Pemikirannya*. Diterjemahkan oleh Henry Heyneardhi dan Anastasia P. Yogyakarta: Penerbit Komunitas APIRU bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Driyarkara. 1980. *Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Ellis, Arthur K. (et. al.). 1991. *Introduction to the Foundations of Education*. Boston, USA: ALLYN AND BACON.
- Freire, Paolo. 1999. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudyartanto. Yogyakarta: REaD bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- _____. 2001. "Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan" dalam Omi Intan Naomi (Penyunting dan Penerjemah). *Menggugat Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fromm, Erich. 2001. "Mendidik Si Automaton" dalam Omi Intan Naomi (Penyunting dan Penerjemah). *Menggugat Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ornstein. Alan C and Levine, Daniel U. 1985. *An Introduction to the Foundations of Education*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Rorty, Richard. 1999. *Philosophy and Social Hope*. England: Penguin Books.
- _____. 1980. *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Sastrapratedja, M. 2003. *Setelah Limaratus Tahun Berakhirkah Humanisme?* Pidato Pengukuhan Jabatan guru Besar Biasa Ilmu Filsafat di adapan Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta tanggal 8 Maret 2003.